

**PELINDUNGAN HUKUM PENATA ANESTESI DALAM
MELAKUKAN PELAYANAN ANESTESI
DI RSUD KONAWE**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan

diajukan oleh

MUHAMMAD AMIN NUR

22C20031

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026**

ABSTRAK

Pelayanan anestesi merupakan bagian krusial dalam tindakan medis operatif yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pasien. Dalam praktiknya, penata anestesi memegang peran penting dalam tahap pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi, khususnya di rumah sakit daerah yang memiliki keterbatasan jumlah dokter spesialis anestesi. Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan dan tumpang tindih pengaturan mengenai kewenangan serta tanggung jawab hukum penata anestesi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi profesi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penata anestesi dalam melaksanakan pelayanan anestesi, pelaksanaan kewenangan penata anestesi dalam praktik pelayanan kesehatan, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan hukum bagi penata anestesi di RSUD Konawe. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta studi lapangan melalui wawancara dengan penata anestesi, dokter spesialis anestesi, dan pihak manajemen RSUD Konawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penata anestesi belum berjalan secara optimal, ketidakjelasan batas kewenangan, serta lemahnya implementasi izin praktik dan standar profesi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan turut menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegasan tanggung jawab hukum agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi penata anestesi.

Kata kunci: Pelindungan Hukum, Penata Anestesi, Kewenangan, Pelayanan Anestesi, Rumah Sakit